

# RAPAT KOORDINASI DAERAH SUB URUSAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN / KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR

**Tema:**  
**Penguatan Kelembagaan Sub Urusan Jasa  
Konstruksi Kabupaten / Kota Menuju  
Berdaya Saing**

**Penajam Paser Utara, 22 November 2023**

**Nicodemus Daud**  
**Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya  
Konstruksi**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

 **KONSTRUKSI  
INDONESIA**

 **BANGGA BUATAN  
INDONESIA**

 **BANGGA  
BERWISATA  
DI INDONESIA**

# OUTLINE

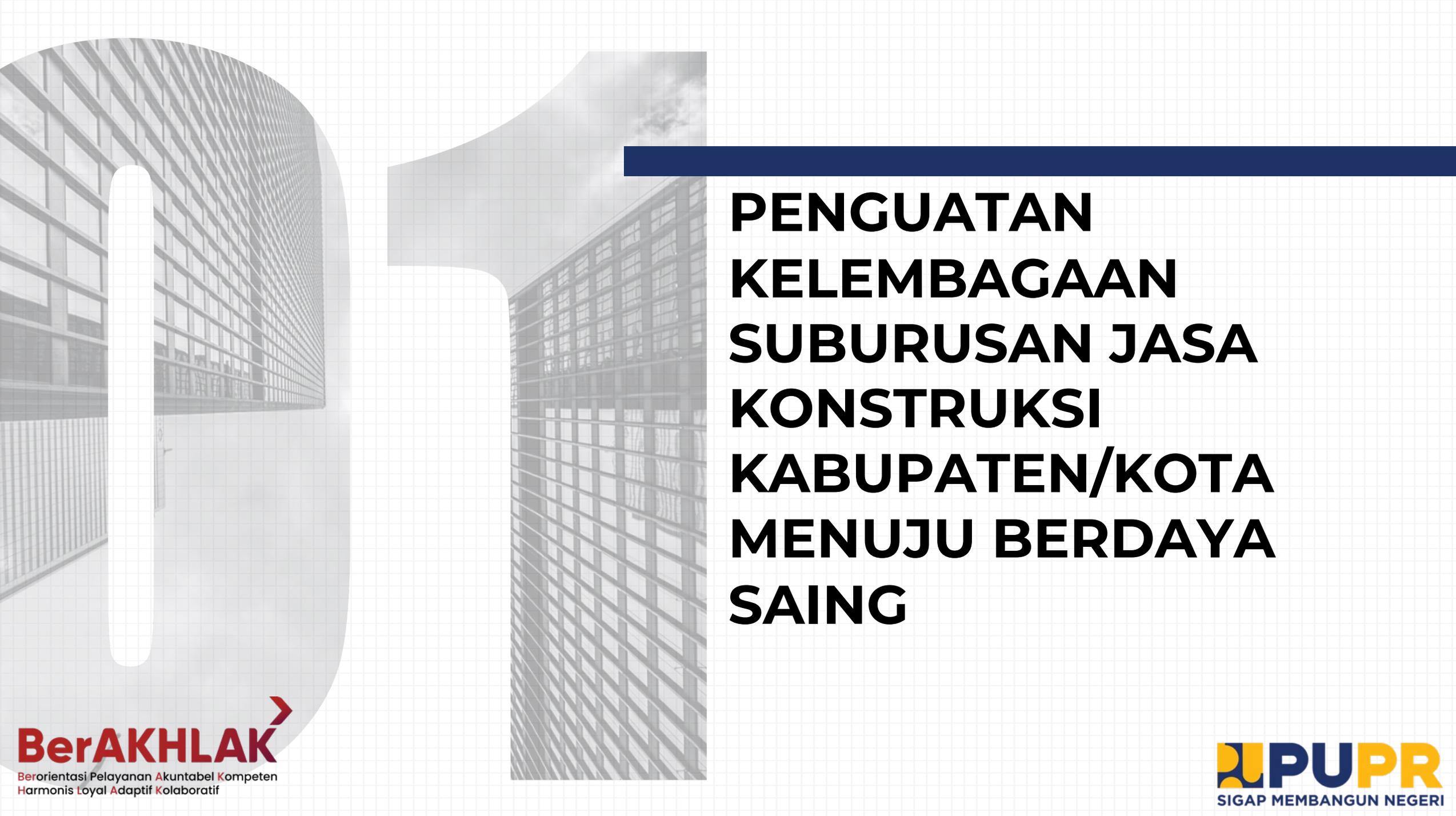


**1. Penguatan Kelembagaan Sub Urusan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota Menuju Berdaya Saing**

**2. Sumber Daya Konstruksi**



**3. Evaluasi Hasil Penilaian Sub Urusan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota Sekalimantan Timur dan persiapan Tahun 2024**



# **PENGUATAN KELEMBAGAAN SUBURUSAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA MENUJU BERDAYA SAING**

# LATAR BELAKANG

Kontani.co.id

## 5 VISI JOKOWI TAHUN KEDEPAN



Melanjutkan pembangunan infrastruktur



Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).



Mengundang investasi seluas-luasnya.



Melanjutkan reformasi birokrasi.



Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.



# KONDISI

**ANGKA KECELAKAAN  
KONSTRUKSI TINGGI  
PENERAPAN STANDAR  
KUALITAS KONSTRUKSI  
RELATIF MASIH RENDAH**

## TENAGA KERJA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT MASIH RENDAH

2020

Jumlah TKK yang bersertifikat  
688.334

2023

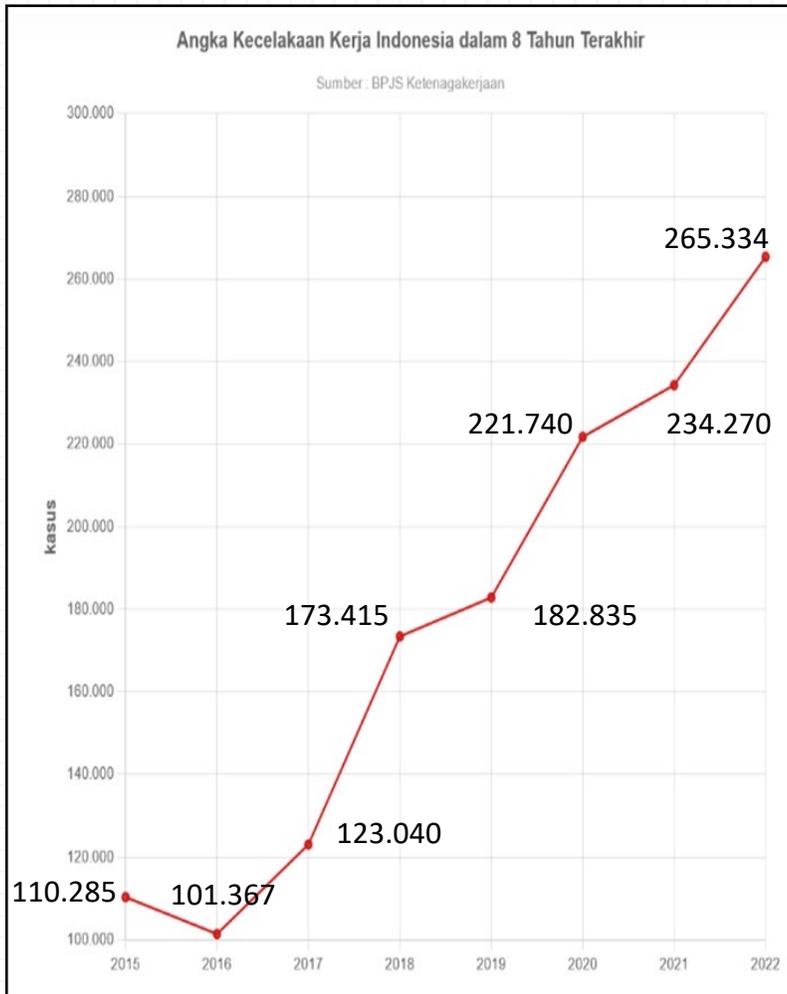
Jumlah TKK bersertifikat hanya 335.133

- ❑ **Kebutuhan nasional TKK bersertifikat** sebesar **2.312.800** orang.
- ❑ Terdapat **gap** TKK bersertifikat sebesar **1.997.667** orang TKK.

**Jumlah LSP** yang dapat melayani sertifikasi TKK masih terbatas



# ANGKA KECELAKAAN KERJA MASIH TINGGI



2019	2020	2021	2022
<b>182.835</b> Kasus	<b>221.740</b> Kasus	<b>234.270</b> Kasus	<b>265.334</b> Kasus

- Kecelakaan konstruksi pada **umumnya disebabkan** karena pemilihan metode kerja, material, peralatan kerja, serta kompetensi pekerja yang **kurang memperhatikan aspek Keselamatan Konstruksi**
- **Kecelakaan konstruksi berdampak pada keberlangsungan penyelenggaraan jasa konstruksi**



# KASUS-KASUS KECELAKAAN KONSTRUKSI

Beton girder proyek Jalan Tol Depok-Antasari, Jakarta, Selasa (2/1/2018)



Kubah Masjid di Makassar Roboh, Makassar, Senin (27/3/2023)



Bangunan Indomart Ambruk, Depok, Senin (6/5/2019)



Runtuhnya Bangunan Gedung Mid-Rise di Slipi, Jakarta, Senin (6/1/2020)



Pekerja Tewas Terjatuh dari Lantai Tiga Bangunan Kampus Unri, Pekanbaru, Senin (24/7/2023)



Jatuhnya besi, proyek Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Minggu (18/03/2018)

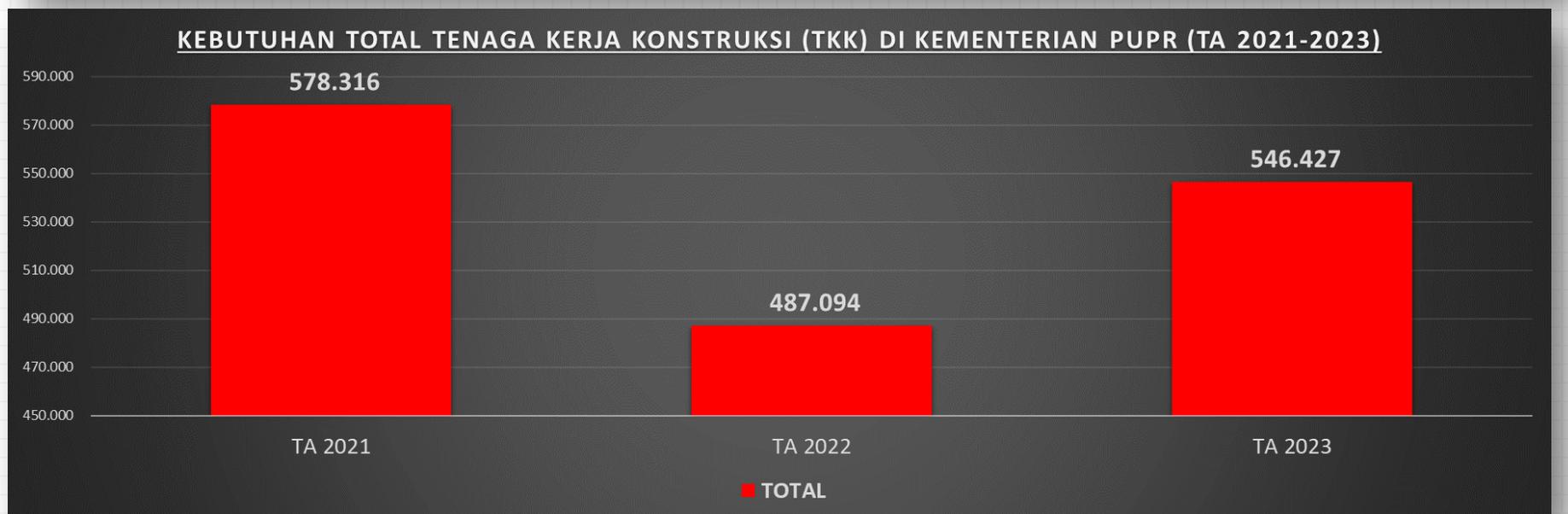


# TINGGINYA KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA (PUPR PUSAT)

Berdasarkan Hasil Simulasi Kebutuhan TKK dengan APBN Kementerian PUPR TA 2023, membutuhkan jumlah TKK sebesar **546.427** orang, yang terdiri dari:

- **17.743** TKK Ahli
- **528.684** TKK Terampil

TA 2023	PAGU ANGGARAN BELANJA MODAL TA 2023			ESTIMASI KEBUTUHAN TKK PUPR TA 2023 (KONSTRUKSI & KONSULTANSI)			
	JENIS PEKERJAAN		TOTAL	AHLI	TERAMPIL		JUMLAH
	KONSTRUKSI	KONSULTANSI			T / A	OPR	
DITJEN SUMBER DAYA AIR	35.043.512.087.000	1.268.035.179.000	36.311.547.266.000	5.819	14.017	168.209	188.046
DITJEN BINA MARGA	43.153.061.100.000	2.570.519.324.000	45.723.580.424.000	8.302	17.261	207.135	232.698
DITJEN CIPTA KARYA	14.521.825.285.000	724.797.035.000	15.246.622.320.000	2.983	5.809	87.131	95.923
DITJEN PERUMAHAN	4.550.303.712.000	106.240.654.000	4.656.544.366.000	638	1.820	27.302	29.760
BPIW	-	113.309.941.000	113.309.941.000	67	-	-	67
<b>TOTAL</b>	<b>97.268.702.184.000</b>	<b>4.782.902.133.000</b>	<b>102.051.604.317.000</b>	<b>17.743</b>	<b>38.907</b>	<b>489.776</b>	<b>546.427</b>



# TINGGINYA KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA (NASIONAL)

**Rasio Tenaga Kerja Konstruksi untuk Pembangunan IKN per 1 Trilyun**

Unit Organisasi	Perbandingan				Jml TKK per 1 triliun (orang)
	TA	TT	TO	TOTAL	
SDA	1	4	48	53	5.300
BM	1	4	48	53	5.300
CK	1	4	60	65	6.500
Perumahan	1	4	60	65	6.500

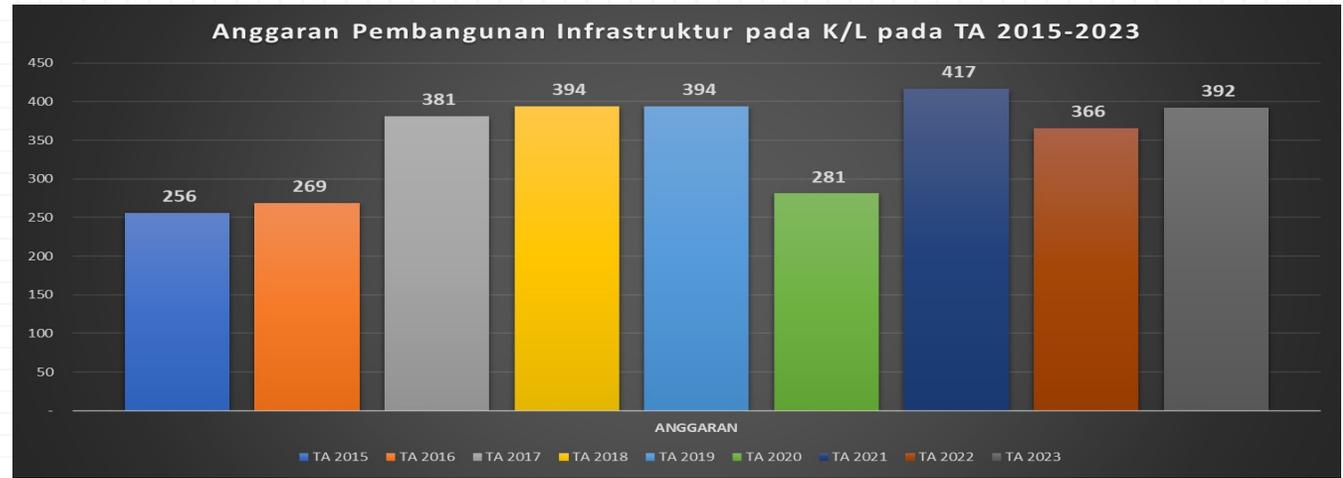
\*)TA : Tenaga Ahli  
TT : Tenaga Teknisi/Analis  
TO : Tenaga Operator

**Asumsi Perhitungan:**  
Best Practices pada Pembangunan Infrastruktur IKN

## KEBUTUHAN NASIONAL

Berdasarkan Hasil Simulasi Kebutuhan TKK untuk Pembangunan IKN tersebut, Pembangunan Infrastruktur secara nasional pada TA 2023, dengan anggaran sebesar 392 Trilyun Rupiah membutuhkan jumlah TKK bersertifikat sebesar 2.312.800 orang.

Adapun Jumlah TKK bersertifikat hanya 335.133 TKK, sehingga terdapat kekurangan TKK bersertifikat sebesar 1.977.667 orang TKK.



# KEBUTUHAN TTK PADA BUJK PJBU-PJTBU-PJSKBU

Penetapan kualifikasi BUJK yang bersifat umum dan spesialis dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan salah satunya adalah Ketersediaan TTK. Ketersediaan TTK yang dimaksud antara lain:

- 1. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU):** adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas suatu badan usaha Jasa Konstruksi
- 2. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU)** adalah tenaga ahli tetap yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha Jasa Konstruksi
- 3. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)** adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan satu subklasifikasi tertentu yang dimiliki badan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Prioritas TTK untuk:

**1. Jenjang 1 s/d 3:**

Memenuhi kebutuhan tenaga terampil

**2. Jenjang 4 s/d 6:**

Prioritas mengisi kebutuhan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)

PETA KEBUTUHAN TTK BERDASARKAN PERSYARATAN PERMOHONAN SBU

	KEBUTUHAN TTK			KETERSEDIAAN TTK	GAP
	PJBU	PJSKBU	JUMLAH		
Jenjang 3	-	-	-	4.827	
Jenjang 4	-	-	-	21.205	
Jenjang 5	-	64.928	64.928	10.839	-28.056
Jenjang 6	64.928	16.477	81.405	18.071	-63.334
Jenjang 7	16.507	3.637	20.144	61.697	41.553
Jenjang 8	3.607	456	4.063	48.218	44.155
Jenjang 9	456	-	456	12.477	12.021
<b>TOTAL</b>	<b>85.499</b>	<b>85.498</b>	<b>170.996</b>	<b>177.334</b>	<b>6.338</b>

Sumber Data LPJK  
Paparan Dirjen BK pada RDP 6 Sep 2023

# KETERSEDIAAN LSP

Sebaran klasifikasi LSP yang telah Beroperasi

ARSITEKTUR	0 LSP
SIPIIL	18 LSP
MEKANIKAL	1 LSP
TATA LINGKUNGAN	1 LSP
MANAJEMEN PELAKSANA	6 LSP
ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI & DESAIN INTERIOR	1 LSP
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA	1 LSP
SAIN DAN REKAYASA TEKNIS	0 LSP

Total LSP Terlisensi:  
**42 LSP**

Total LSP Beroperasi:  
**28 LSP**

No	Klasifikasi	LSP Terlisensi	LSP Beroperasi
1	Arsitektur	-	-
2	Sipil	31	18
3	Mekanikal	1	1
4	Tata Lingkungan	1*	1*
5	Manajemen Pelaksanaan	7	6
6	Arsitektur Lanskap, Iluminasi dan Desain Interior	1*	1*
7	Perencanaan Wilayah dan Kota	1	1
8	Sains dan Rekayasa Teknis	-	-
JUMLAH		42	28

Idealnya jumlah LSP yang dibutuhkan adalah 2x subklasifikasi atau sejumlah **102 LSP**.  
**(LSP Beroperasi: 27,45%)**

# PERMASALAHAN LAIN

PEMBANGUNAN MANGKRAK, KONTRAKTOR KABUR, SUBKONTRAKTOR/VENDOR TIDAK DIBAYAR

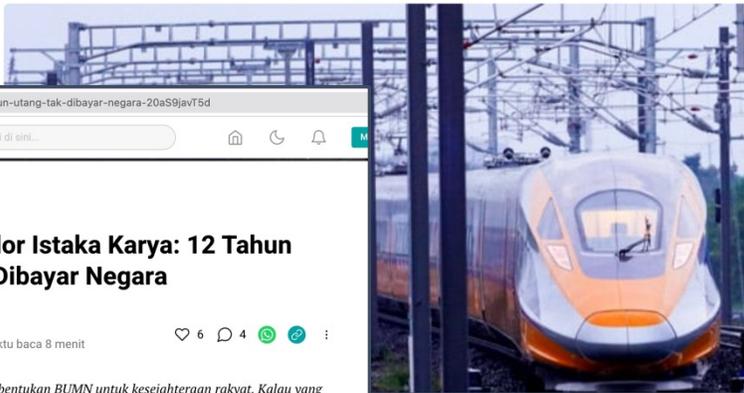
## Curhat Pilu Sub Kontraktor Kereta Cepat Jakarta Bandung yang Belum Dibayar Pemerintah, Tak Sanggup Bayar Uang Sekolah Anak hingga Aset Disita

Redaksi Fajar Online - Nasional

Senin, 7 Agustus 2023 11:59 AM

Komentar

BAGIKAN



Beranda > Bisnis

### Nasib Vendor Istaka Karya: 12 Tahun Utang Tak Dibayar Negara

kumparanBISNIS

12 Juni 2023 15:24 · waktu baca 8 menit

"Tujuan utama pembentukan BUMN untuk kesejahteraan rakyat. Kalau terjadi kebalikannya, menindas, berarti ini penjajahan gaya baru. Modal dari kami, tenaga kami, jadi seperti romusha—kerja enggak dibayar."

- Bambang Susilo, Ketua Persatuan Korban Istaka Karya (Perkobik) dan Perwakilan Persatuan Korban BUMN (Perkobum)

Empat tahun lalu, 2019, Bambang Susilo menjadi subkontraktor pemasok batu dan pasir untuk proyek Underpass Kentungan, Yogya, yang dikerjakan PT Istaka Karya (Persero). Namun, sampai saat ini hasil kerjanya belum dibayar.

Sudah empat tahun Bambang menunggu pembayaran dari Istaka yang tak kunjung cair. Ia bukan yang paling sial, sebab kawan-kawannya di Perkobik mengalami nasib lebih buruk. Mereka menunggu bayaran atas haknya sampai belasan tahun untuk, dan hingga kini tak jua terpenuhi.

detiksulsel Home Berita Sepakbola Hukum & Kriminal Budaya Wisata Kuliner

### Proyek Jalan Pemprov Sulsel di Soppeng Mandek-Kontraktor Kabur

Agung Pramono - detikSulsel

Sabtu, 03 Jun 2023 16:05 WIB



Foto: Anggota DPRD Sulsel Selle KS Dalle. (Agung Pramono/detikSulsel)

**Soppeng** - Legislator DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Selle Ks Dalle mengungkap sejumlah proyek pembangunan jalan di Kabupaten Soppeng mandek karena kontraktor kabur. Pemprov Sulsel diminta agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

### Proyek Jembatan Gantung Rp 2,9 M di Barru Mangkrak karena Kontraktor Kabur

Muhclis Abdul - detikSulsel

Selasa, 14 Mar 2023 18:04 WIB



Foto: Kondisi proyek jembatan gantung di Barru senilai Rp 2,9 miliar yang mangkrak. (Dok. Istimewa)

**Barru** - Proyek jembatan gantung senilai Rp 2,9 miliar di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel) dipastikan mangkrak. Kontraktor pelaksana proyek itu kabur hingga tidak menyelesaikannya hingga batas waktu yang ditentukan.

**YANG PENTING**

**PENTINGNYA KEMAMPUAN KEUANGAN**

## DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SUMBER  
DAYA  
MANUSIA

ANGGARAN

PERALATAN



# KEWENANGAN OPD SUBURUSAN JAKON

UU 23 TAHUN 2014, UU 2 TAHUN 2017, PP 22 TAHUN 2020

## PEMERINTAH PROVINSI

- a. Pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b. Pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi

Tugas Lain di PP 22/2020

- 1) Pengawasan Penyelenggaraan JaKon
- 2) Pembinaan JaKon
- 3) Monitoring dan evaluasi

## PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

- a. Pelatihan tenaga terampil
- b. Pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kab/kota
- c. Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi\*
- d. Pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan, & pemanfaatan jasa konstruksi

Tugas Lain di PP 22/2020

- 1) Pembinaan JaKon
- 2) Monitoring dan evaluasi

dapat **melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi**

PP 14 Tahun 2021

**\*dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha berbasis Risiko**

PP 14 Tahun 2021

dilaksanakan sesuai dengan **NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA** yang ditetapkan oleh **Pemerintah Pusat**

# PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

PP 22 Tahun 2020 Pasal 97

PP 22 Tahun 2020 Pasal 98-110

## PEMERINTAH PUSAT Kepada

- penyelenggara pemerintah daerah provinsi
- masyarakat jasa konstruksi

PP 22 Tahun 2020 Pasal 111-115

## PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Kepada

masyarakat jasa konstruksi

PP 22 Tahun 2020 Pasal 116-

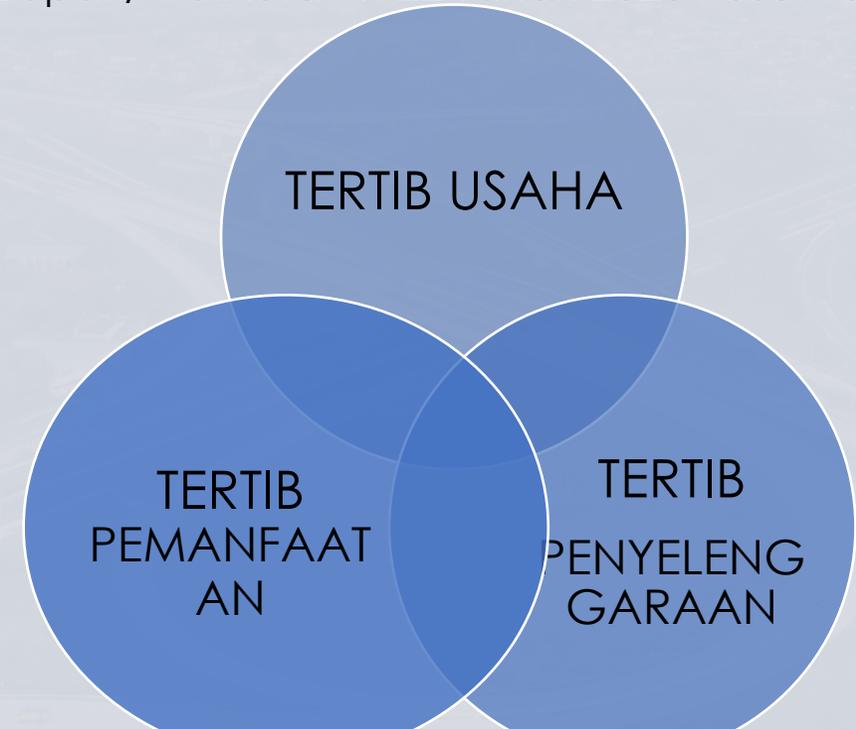
## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA kepada

masyarakat jasa konstruksi

# PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

PP 22 Tahun 2020 Pasal 121

Menteri PP 22 Tahun 2020 Pasal 122-128  
Gubernur PP 22 Tahun 2020 Pasal 129-131  
Bupati/Walikota PP 22 Tahun 2020 Pasal 132-135



**NSPK PEMERINTAH PUSAT  
PERMEN PUPR NO 1 TAHUN 2023**

# 11 MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

**Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan / atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi**

**Asosiasi Perusahaan**

**Pelaku Rantai Pasok.**

**Asosiasi Profesi.**

**Tenaga Kerja Konstruksi.**

**Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Konstruksi.**

**Pemerhati Konstruksi.**

**Pengguna Jasa.**

**Lembaga Sertifikasi Jasa Konstruksi.**

**Penyedia Jasa.**

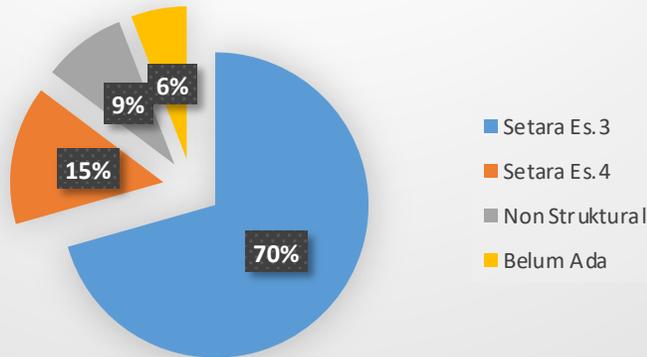
**Pemanfaat Produk Jasa Konstruksi.**

**Perguruan Tinggi / Pakar.**

# Profil OPD Jasa Konstruksi Provinsi

2022

Data OPD Provinsi berdasarkan Jumlah Eselon



24 Provinsi setingkat eselon 3

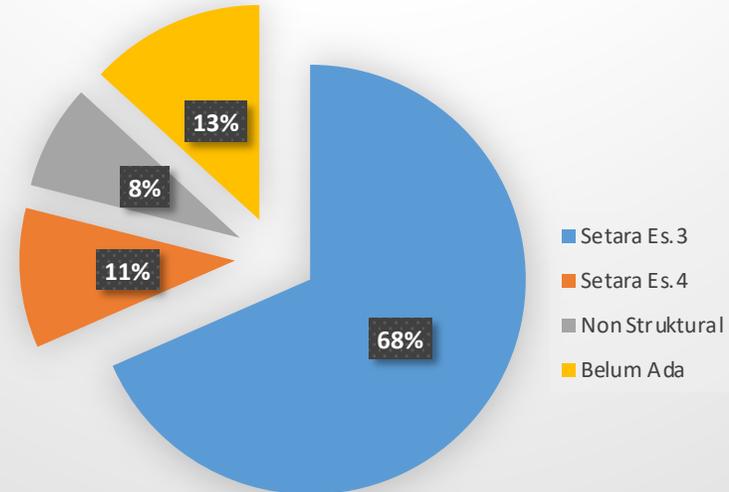
5 Provinsi setingkat eselon 4

3 Provinsi non struktural

2 Provinsi belum terdapat OPD

2023

Data OPD Provinsi berdasarkan Jumlah Eselon



26 Provinsi setingkat eselon 3

4 Provinsi setingkat eselon 4

3 Provinsi non struktural

5 Provinsi belum terdapat OPD

**5 PROVINSI** yang belum memiliki OPD Sub-urusan Jasa Konstruksi (Aceh, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya) dan Penguatan OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi

# Profil OPD Jasa Konstruksi Kab/Kota

2022

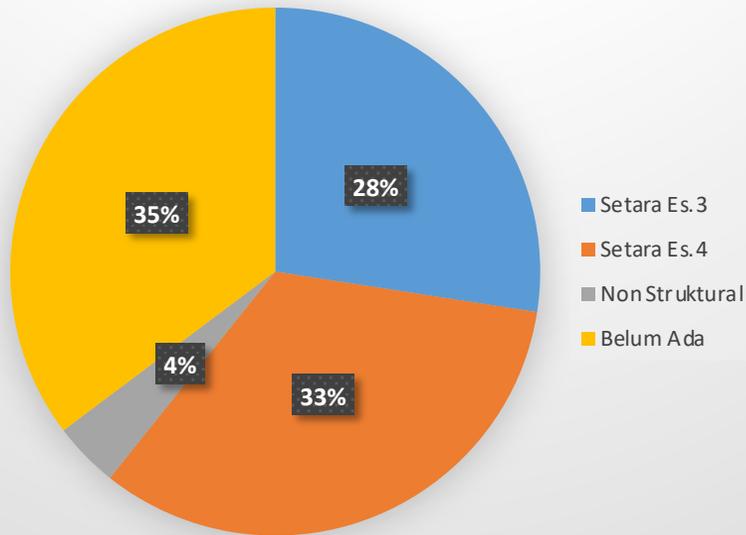
137 Kab/Kota setingkat eselon 3

166 Kab/Kota setingkat eselon 4

20 Kab/Kota non struktural

176 Kab/Kota belum terdapat OPD

Data OPD Kab/Kota berdasarkan Jumlah Eselon



Fokus : 176 Kab/Kota yang belum memiliki OPD Jasa Konstruksi

2023

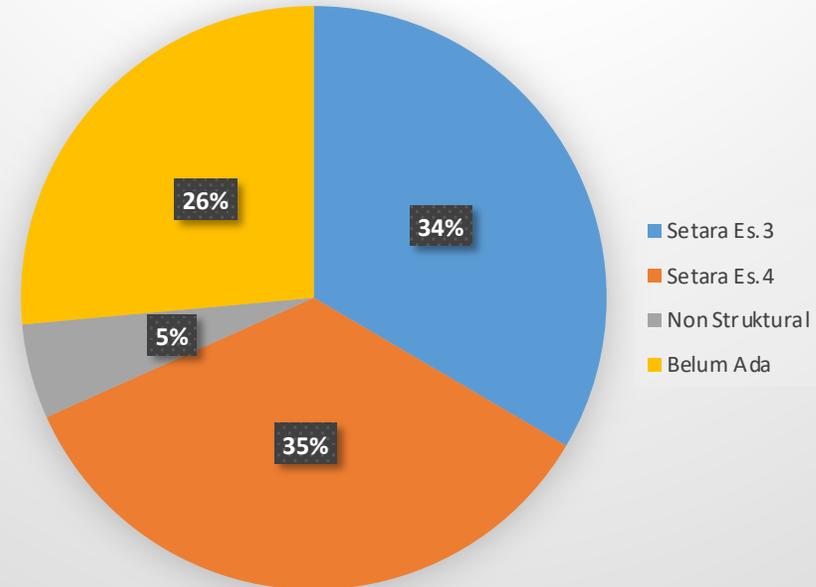
172 Kab/Kota setingkat eselon 3

179 Kab/Kota setingkat eselon 4

27 Kab/Kota non struktural

136 Kab/Kota belum terdapat OPD

Data OPD Kab/Kota berdasarkan Jumlah Eselon



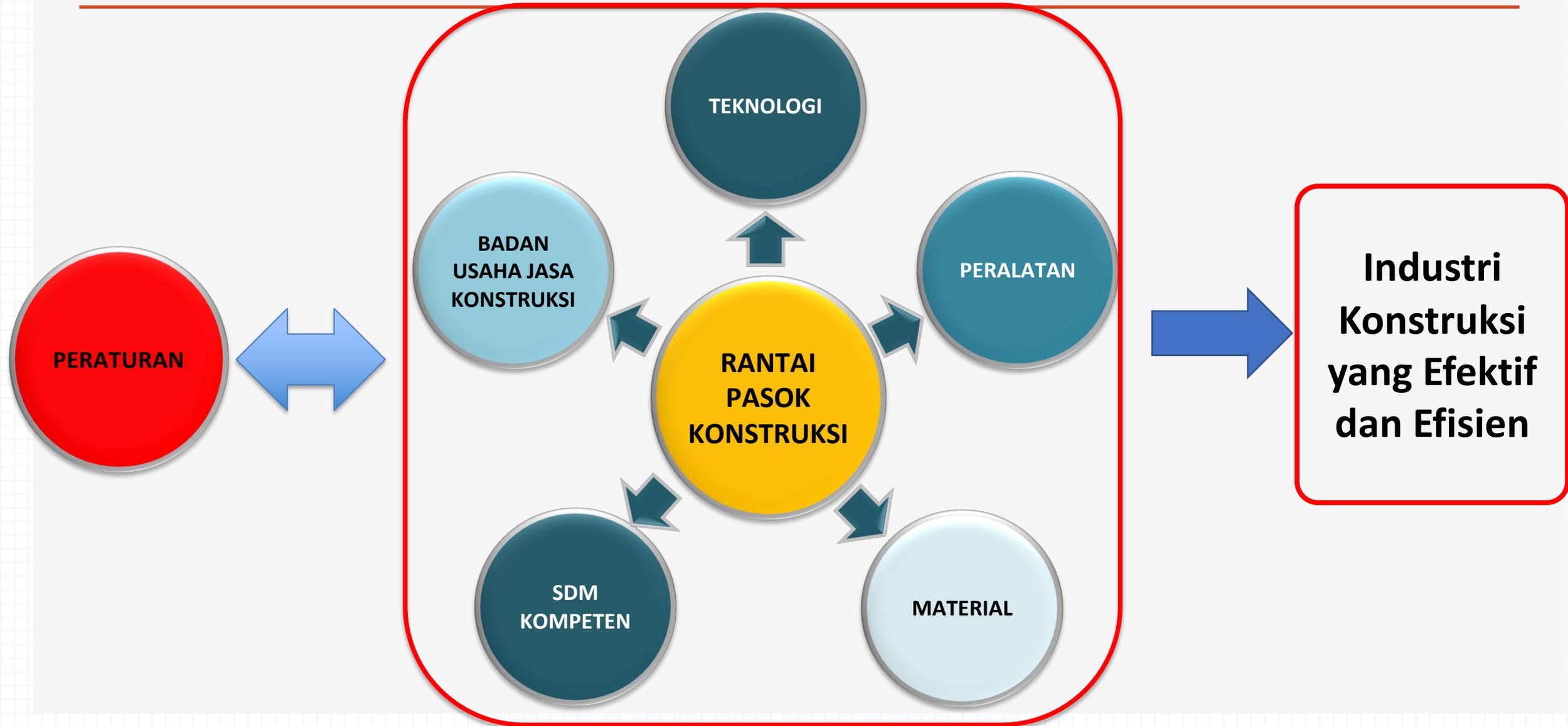
Fokus : 136 Kab/Kota yang belum memiliki OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi dan Penguatan OPD Sub-urusan Jasa Konstruksi

No	Daerah	HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*			OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi				KETERANGAN
		TINGKAT INTENSITAS BEBAN KERJA			Ess. III	Ess.IV	Hanya Tusi	Tdk Ada	
		Skor	Kategori	Tipe					
1	Provinsi Kalimantan Timur	946	BESAR	A	1				Sesuai
2	Kabupaten Berau	860	BESAR	A		1			Sudah dapat setingkat Es 3
3	Kabupaten Kutai Barat	678	SEDANG	B	1				Sesuai
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	856	BESAR	A	1				Sesuai
5	Kabupaten Kutai Timur	851	BESAR	A	1				Sesuai
6	Kabupaten Mahakam Ulu	583	KECIL	C	1				
7	Kabupaten Paser	638	SEDANG	B	1				Sesuai
8	Kabupaten Panajam Paser Utara	814	BESAR	A		1			Sudah dapat setingkat Es 3
9	Kota Balikpapan	801	BESAR	A				1	Sudah dapat setingkat Es 3
10	Kota Bontang	644	SEDANG	B	1				Sesuai
11	Kota Samarinda	827	BESAR	A	1				Sesuai



# SUMBER DAYA KONSTRUKSI

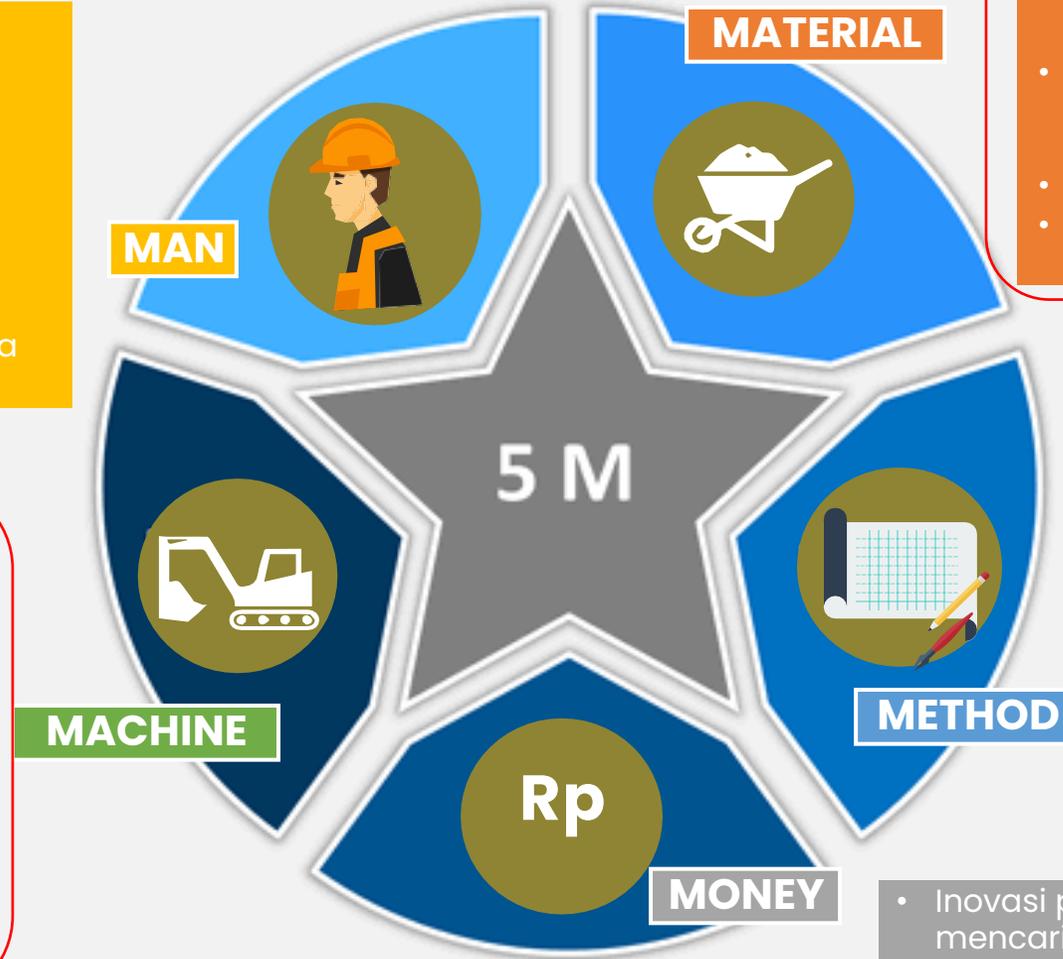
# KESIAPAN SUMBER DAYA RANTAI PASOK KONSTRUKSI



# TANTANGAN RANTAI PASOK SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI

- Analisa beban kerja
- Manajemen performa
- Struktur pekerjaan
- Efisiensi tenaga kerja
- Analisa keselamatan dan kesehatan kerja
- Desain lingkungan kerja
- Desain struktur organisasi
- Sertifikasi kompetensi tenaga kerja

- **Sistem Pencatatan dan Informasi peralatan konstruksi : integrasi data, sebaran dan mobilisasi**
- **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)**
- **Manajemen asset peralatan**
- **Ketersediaan peralatan**
- **transfer teknologi peralatan**



- **Sistem pencatatan dan informasi material konstruksi : integrasi data, sebaran dan mobilisasi**
- **Ketersediaan bahan baku material konstruksi di wilayah- wilayah Indonesia**
- **Ketergantungan dengan material impor**
- **manajemen rantai pasok material**

- Perkembangan teknologi dunia konstruksi yang begitu cepat
- Inovasi metode pelaksanaan pekerjaan dan teknologi konstruksi
- Modernisasi pengadaan (pelelangan)
- Sistem manajemen mutu dan keselamatan konstruksi
- analisa resiko pekerjaan
- standar prosedur operasi
- manajemen proyek

- Inovasi pembiayaan infrastruktur dalam mencari sumber pendanaan infrastruktur
- Pembiayaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur
- Pengelolaan resiko pendanaan infrastruktur

# ESTIMASI KEBUTUHAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR TA 2024



**PAGU BELANJA  
TA. 2024 (AWAL)  
Rp 147,373  
Triliun**

Status : 13 Nov 2023

**TOTAL ANGGARAN BELANJA MODAL  
DITJEN TEKNIS TA 2023**

**Rp. 145,531 Triliun**

**\*) ASUMSI BELANJA FISIK 68%  
dari Pagu Belanja Barang &  
Modal**

**Ditjen Sumber  
Daya Air**

Semen	Baja	Aspal	Beton Pracetak	Peralatan
1.706.929 ton	507.271 ton	15.657 ton	195.500 ton	3.483 unit

**Ditjen Bina  
Marga**

Semen	Baja	Aspal	Beton Pracetak	Peralatan
1.291.594 ton	264.313 ton	702.045 ton	356.791 ton	2.375 unit

**Ditjen Cipta  
Karya**

Semen	Baja	Aspal	Beton Pracetak	Peralatan
1.302.865 ton	298.878 ton	78.076 ton	618.940 ton	1.592 unit

**Ditjen  
Perumahan**

Semen	Baja	Aspal	Beton Pracetak	Peralatan
284.116 ton	49.413 ton	48.519 ton	67.221 ton	327 unit

**TOTAL  
KEBUTUHAN  
SDMPK**

Semen	Baja	Aspal	Beton Pracetak	Peralatan
4.585.504 ton	1.119.875 ton	844.298 ton	1.238.451 ton	7.777 unit



# Evaluasi Hasil Penilaian Sub Urusan Jasa Konstruksi Se- Kalimantan Timur dan persiapan Tahun 2024



Beberapa *event* / kegiatan yang diselenggarakan pada pelaksanaan **Konstruksi Indonesia 2023**, antara lain:



### **National Call for Paper & Penyelenggaraan Konferensi:**

- *Launching* Buku KI 2023;
- *Business Matching*, ACPECC & AAC Meeting;
- Inovasi MPK, Teknologi Konstruksi, Pembiayaan & Pembinaan SDM



### **Pameran & Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023:**

- **Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;**
- Penerapan BIM, TKDN, SMK



### **Kompetisi Konstruksi Indonesia:**

- Lomba Tenaga Kerja Konstruksi (TKK);
- Lomba Foto & Video; *dan*
- Lomba Inovasi Konstruksi.



### **Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2023:**

- Akademisi;
- Praktisi Jasa Konstruksi;
- ASN dan Kementerian/Lembaga.

Bentuk pembinaan Pemerintah Pusat

- meningkatkan kapasitas kinerja untuk sub urusan jasa konstruksi
- membantu untuk memberikan gambaran kondisi OPD saat ini.

# Indikator Penilaian OPD SubUrusan Jasa Konstruksi

A. OPD Provinsi		
Indikator	Sub Indikator	Bobot
Indikator Kapasitas Kelembagaan		20
	Struktur Organisasi	5
	Sumber Daya Manusia	5
	Kapasitas Keuangan	5
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	5
Indikator Output		40
	Pembinaan	18
	Pengawasan	9
	Pengelolaan SIPJAKI	10
	Pengaturan	3
Indikator Outcome		40
	Rasio tenaga kerja konstruksi ahli terlatih	8
	Rasio Kegiatan Konstruksi APBD Provinsi tanpa kecelakaan konstruksi	6
	Rasio Sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan ahli	8
	Rasio Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi	6
	Rasio Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	6
	Rasio Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk Konstruksi	6

B. OPD Kabupaten/Kota		
Indikator	Sub Indikator	Bobot
Indikator Kapasitas Kelembagaan		20
	Struktur Organisasi	5
	Sumber Daya Manusia	5
	Kapasitas Keuangan	5
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	5
Indikator Output		40
	Pembinaan	15
	Pengawasan	12
	Pengelolaan SIPJAKI	10
	Pengaturan	3
Indikator Outcome		40
	Rasio tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi/ analis terlatih	6
	Rasio Kegiatan Konstruksi APBD Kab/Kota tanpa kecelakaan konstruksi	5
	Rasio Sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi/analis	6
	Rasio Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	6
	Rasio Pengawasan Tertib Usaha Konstruksi	6
	Rasio Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	6
	Rasio Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memperoleh pembinaan	5

Tahun 2024 Rencana Penambahan SubIndikator

tentang pembinaan dalam penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)



# Penghargaan dalam Rangka KI 2023

Kategori Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dengan penerima penghargaan yaitu Organisasi Perangkat Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI  
Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7390653 Faksimili (021) 72799238

Nomor : BK0901-KA/1666 Jakarta, 26 September 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Rencana Pemberian Penghargaan kepada OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi sebagai Rangkaian Pelaksanaan Event Konstruksi Indonesia pada 1-3 November 2023

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Up. Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota di-  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Event Konstruksi Indonesia di Jakarta International Expo pada tanggal 1-3 November 2023, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengusulkan adanya pemberian penghargaan kepada OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi terbaik kategori mendukung pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi akan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja kepada OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi TA 2023, dan pemberian penghargaan untuk OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi dengan skor tertinggi;
  - Indikator Penilaian untuk evaluasi terhadap OPD terdiri atas:
    - Indikator Kapasitas Kelembagaan (20%);
    - Indikator Output (40%); dan
    - Indikator Outcome (40%).
  - Formulir Penilaian Kinerja OPD Sub-Urusan Jasa Konstruksi dan tata cara pengisian dapat diakses melalui [link](#) sebagai berikut:
    - untuk OPD Provinsi: [https://bit.ly/Form\\_Monev\\_OPD](https://bit.ly/Form_Monev_OPD)
    - untuk OPD Kabupaten/Kota: [https://bit.ly/Form\\_Monev\\_OPD](https://bit.ly/Form_Monev_OPD)
    - bukti dukung untuk formulir yang telah diisi dapat dikirimkan melalui email [kelembagaan.djbk@pu.go.id](mailto:kelembagaan.djbk@pu.go.id) dan [kelembagaan.djbk@gmail.com](mailto:kelembagaan.djbk@gmail.com)
  - OPD sub-urusan Jasa Konstruksi diharapkan mengisi formulir penilaian kinerja dan mengirimkan bukti dukung paling lambat Selasa, 10 Oktober 2023 Pukul 16.00 WIB.
  - Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Muhamad Rafi Yusri (0813-8942-4747), Sdr. Raihan Taqy (0858-9442-3312), dan Sdr. Ni'matullah Mausul (0813-8888-0802).
- Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi,



Nisodemus Dulu  
NIP. 196412011997031002

Tembusan:  
Direktur Jenderal Bina Konstruksi.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp/Faks. (021) 72799238

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
NOMOR **75/3975/DK/2023**

TENTANG

PENETAPAN USULAN PENERIMA  
PENGHARGAAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DALAM RANGKA HARI KONSTRUKSI INDONESIA TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Hari Konstruksi Indonesia Tahun 2023 akan diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dalam pelaksanaan bidang Jasa Konstruksi kepada *stakeholder* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Usulan Penerima Penghargaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Hari Konstruksi Indonesia Tahun 2023.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);



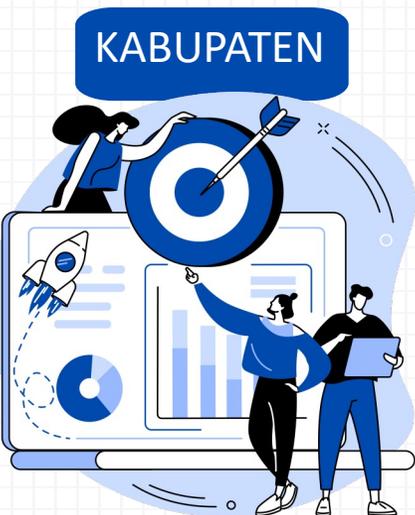
Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023

Jumat, 3 November 2023

Hall D1 JIExpo Kemayoran Jakarta



# PENERIMA PENGHARGAAN OPD 2023



NO	OPD YANG MEMBIDANGI SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI	NAMA PROVINSI	UNIT KERJA SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI
1	2	3	4
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Balai Jasa Konstruksi	Jawa Tengah	Balai Jasa Konstruksi
2.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Kalimantan Timur	Bidang Bina Konstruksi
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kalimantan Utara	Bidang Bina Jasa Konstruksi

NO	OPD YANG MEMBIDANGI SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI	NAMA KABUPATEN	UNIT KERJA SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI
1	2	3	4
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun (Jawa Timur)	Bidang Jasa Konstruksi
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Barito Kuala (Kalimantan Selatan)	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Gresik (Jawa Timur)	Bidang Bina Jasa Konstruksi



# VIDEO MALAM PENGHARGAAN KONSTRUKSI INDONESIA 2023



# PENERIMA PENGHARGAAN OPD 2023



## Memperoleh:

- juara 1, program pelatihan dan sertifikasi untuk 500 (lima ratus) TKK,
- juara 2, program pelatihan dan sertifikasi untuk 350 (tiga ratus lima puluh) TKK, dan
- juara 3, program pelatihan dan sertifikasi untuk 200 (dua ratus) TKK

## Arahan Bapak Menteri PUPR

Penerima penghargaan mendapatkan program Bina Marga masing-masing sebesar 10 M



## Memperoleh:

- juara 1, program pelatihan dan sertifikasi untuk 400 (empat ratus) TKK,
- juara 2, program pelatihan dan sertifikasi untuk 300 (tiga ratus) TKK, dan
- juara 3, program pelatihan dan sertifikasi untuk 200 (dua ratus) TKK

## Arahan Bapak Menteri PUPR

Penerima penghargaan mendapatkan program perbaikan rumah swadaya masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) rumah atau sebesar 5 M



# EVALUASI PENGHARGAAN OPD 2023 SE KALIMANTAN TIMUR



Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu dari 3 (tiga) terbaik OPD SubUrusan jasa Konstruksi dengan Kategori Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  
Semoga dapat mempertahankan dan menaikkan nilainya

Tahun 2022: Peringkat 3 dng Nilai 80.2

Tahun 2023: Peringkat 2 dng Nilai 82.8

Dari 3 Kota di Provinsi Kalimantan Timur ada 2 Kota yang mengirimkan data kecuali Kota Balikpapan walau secara self declare mengakui nilai di bawah ambang batas 60 namun di atas 50 namun setelah diverifikasi juga nilainya berkurang dan tidak memenuhi ambang (TIDAK ada KOTA yang mendapat penghargaan)

- Dari 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya mengirim data
- 2 Kabupaten mengirim tanpa bukti dukung sedangkan 5 lainnya secara *self declare* mengakui nilai di bawah ambang batas yaitu 60 setelah diverifikasi juga nilainya tambah berkurang

Bukti untuk Tahun berjalan yaitu tahun 2023 namun menjadi evaluasi penilaian di TA 2024 bahwa bukti dapat dari Okt Tahun Sebelum hingga Sep Tahun berjalan  
Bukti tidak lengkap terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi



**TERIMA KASIH**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif